DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
ABSTRAK vii
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME ix
MOTTO HIDUP x
HALAMAN PERSEMBAHAN xi
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Rumusan Masalah 23
C. Tujuan Penelitian 23
D. Manfaat Penelitian 23
E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 24
F. Kerangka Berfikir 24
G. Penelitian Terdahulu 26
BAB II 29
TINJAUAN PUSTAKA 29
A. Tinjauan Umum tentang Siyasah Dusturiyyah 29
1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah 29
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyyah 30
3. Prinsip-Prinsip Dasar Siyasah Dusturiyyah 32
B. Tinjauan Umum tentang Konflik dan Resolusi Konflik 36
1. Pengertian Konflik 36
2. Tipologi Konflik 36
3. Teori Resolusi Konflik 37
4. Teori Mediasi Humanistik 39
C. Tinjauan Umum tentang Konflik Papua 40
1. Latar Belakang Historis Konflik Papua 40
2. Dinamika Konflik Papua 41
3. Dimensi-Dimensi Konflik Papua 42

D. Tinjauan tentang Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Konflik 44
1. Pendekatan Keamanan 44
2. Pendekatan Pembangunan 44
3. Pendekatan Dialog dan Rekonsiliasi 45
BAB III 46
METODOLOGI PENELITIAN 46
BAB IV 48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
A. Kebijakan dan Tindakan Pemerintah dalam Menangani Konflik di Papua pada era ored baru hingga sekarang 48
1. Kebijakan Keamanan dan Pertahanan 48
2. Kebijakan Otonomi Khusus 52
3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi 54
4. Kebijakan Dialog dan Rekonsiliasi 56
B. Kebijakan Penanganan Konflik Papua menurut Pandangan Siyasah Dusturiyyah 57
1. Analisis Kebijakan Keamanan melalui Perspektif Siyasah Dusturiyyah 57
2. Analisis Kebijakan Otonomi Khusus melalui Perspektif Siyasah Dusturiyyah 58
3. Analisis Kebijakan Pembangunan melalui Perspektif Siyasah Dusturiyyah 60
4. Analisis Kebijakan Dialog melalui Perspektif Siyasah Dusturiyyah 62
C. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Siyasah Dusturiyyah untuk Penyelesaian Konflik Papua 63
1. Penguatan Keadilan Distributif sebagai Fondasi Perdamaian 63
2. Penerapan Syura sebagai Landasan Tata Kelola Papua 65
3. Pemulihan Sosial dan Rekonsiliasi Historis 66
4. Reformasi Representasi Politik dan Otonomi Bermakna 67
5. Perlindungan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua 68
6. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Papua 69
7. Pembangunan Narasi Kebangsaan yang Inklusif dan Berkeadilan 70
BAB V 73
PENUTUP 73
A. Simpulan 73
B. Saran 74

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG